

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2018**



**BPKAD KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2019**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 dapat kami susun sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik berisikan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah untuk mendorong penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.

Materi LKjIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta ukuran atas kegiatan program dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra untuk tahun yang bersangkutan, disamping itu juga LKjIP memuat informasi mengenai pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan instrumen untuk mendorong supervisi serta mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat, dan selanjutnya diharapkan akan mendorong peran serta masyarakat serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sesuai dengan kemampuan penganggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang telah melaksanakan kewajiban dalam mengemban amanat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam pengelolaan keuangan dengan hasil yang baik sebagaimana tercermin dalam LKjIP yang telah berhasil disusun.

Harapan kami, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Pemalang, Januari 2019

BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

W JOKO SUSILO, SH, MAP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661224 199203 1 005

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	2
B. Struktur Organisasi .....	4
C. Komposisi Pegawai .....	6
D. Tujuan dan Manfaat LKjIP .....	7
E. Sistematika Penyajian .....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	9
A. Rencana Strategis .....	9
B. Perjanjian Kinerja .....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	23
A. Capaian Kinerja.....	23
B. Akuntabilitas Keuangan .....	27
BAB IV PENUTUP .....	46
LAMPIRAN	
1. Copy Hasil Opini BPK terhadap LKD Tahun 2017 - WTP	
2. Copy surat pengantar sebagai bukti penyampaian Raperda APBD TA 2018 dan Raperda Perubahan APBD TA 2018 – Tepat Waktu	
3. Copy surat pengantar sebagai bukti dukung penyampaian Laporan Keuangan Daerah TA 2017 ke BPK – Tepat Waktu	
4. Copy surat pengantar sebagai bukti dukung penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 – Tepat Waktu	
5. Data Aset Daerah yang tercatat pada KIB dan Data Aset Daerah yang tercatat pada Neraca Daerah - ....%	
6. Bukti dukung Penerbitan SP2D tepat waktu – 3 hari	
7. Alasan Ketidaktercapaian Output Kegiatan	
8. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
9. Rencana Kerja Kegiatan Tahun 2019	

## DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1 : Mekanisme penyusunan LKjIP BPKAD .....	3
Tabel 1.2 : Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Pemalang berdasarkan Tingkat Golongan .....	6
Tabel 1.3 : Distribusi Pegawai BPKAD Kabupaten Pemalang Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	6
Tabel 2.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPKAD Kabupaten Pemalang .....	14
Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Pemalang .....	22
Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	23
Tabel 3.2 : Pengukuran Kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2018 .....	24
Tabel 3.3 : Program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja perangkat daerah .....	28
Tabel 3.4 : Realisasi Kinerja Tahun 2018 .....	43

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tugas pokoknya yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Guna mendukung tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada Tahun Anggaran 2018 telah bersepakat menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Sesuai RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) BPKAD hanya satu yaitu ” Hasil Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah ( LKD )”. IKU BPKAD tersebut didukung dengan 5 ( Lima ) Indikator Kinerja Sasaran ( IKS ), dimana kelima indikator kinerja sasaran tersebut pada Tahun 2018 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Rincian pencapaian target IKS pada Tahun 2018 selanjutnya dijelaskan dalam Laporan kinerja Instansi Pemerintah ( LkjIP ) BPKAD Tahun 2018.

Dalam rangka mendukung IKU dan IKS, BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2018 melaksanakan 6 program yang terdiri dari 65 kegiatan yang didukung anggaran sebesar Rp. 21.010.207.900,00. Target anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 19.428.770.695,00 atau 92,47 %.

Berdasarkan ketercapaian target kinerja utama pada Tahun Anggaran 2018 yaitu berupa ”Opini WTP” dari BPK atas LKD Tahun 2017, ketercapaian target 5 ( lima ) indikator kinerja sasaran serta serapan anggaran Tahun 2018 maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD telah dilaksanakan dengan baik.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pemerintahan yang baik atau *good governance* ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2002: 17) “*good governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik”. *Good governance* dapat terwujud apabila diperlukan adanya akuntabilitas di organisasi sektor publik dan untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut dibutuhkan kerja sama yang baik antar departemen yang bersangkutan (Ryan, 2004).

Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi, sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Laporan Akuntabilitas akan memberi gambaran status tingkat ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk mengevaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu

kepada jadwal yang telah ditetapkan dan menerapkan efisiensi, efektivitas terhadap pengeluaran belanja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

## **1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah serta tugas pembantuan.










Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksana tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang menggunakan mekanisme sebagai berikut :



Table 1.1  
Mekanisme Pengumpulan Data Dukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran ( IKS ) BPKAD Kabupaten Pemalang

No.	Kegiatan	Tim Penyusun LkjIP BPKAD	Bidang	Kepala BPKAD
1.	Menginventarisir data-data yang dibutuhkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) sesuai indikator yang ditetapkan dan membuat kertas kerja terkait pencapaian target kinerja.			
2.	Menyampaikan bukti-bukti/data dukung ketercapaian target kinerja yang sesuai dengan Indikator masing-masing bidang			
3.	Menghimpun, memverifikasi, mengklasifikasi dan mensinkronkan bukti-bukti/data dukung tercapainya indikator kinerja dari masing-masing bidang.			
4.	Menyusun <i>draft</i> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD			
5.	Meneliti dan mengoreksi <i>draft</i> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) BPKAD			
6.	Melakukan koreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) sesuai petunjuk Kepala BPKAD			
7.	Melakukan Evaluasi atas tercapai atau tidak tercapainya target kinerja bersama bidang-bidang.			
8.	Menandatangani LKjIP BPKAD yang telah dievaluasi dan dikoreksi.			

## **2. Struktur Organisasi**

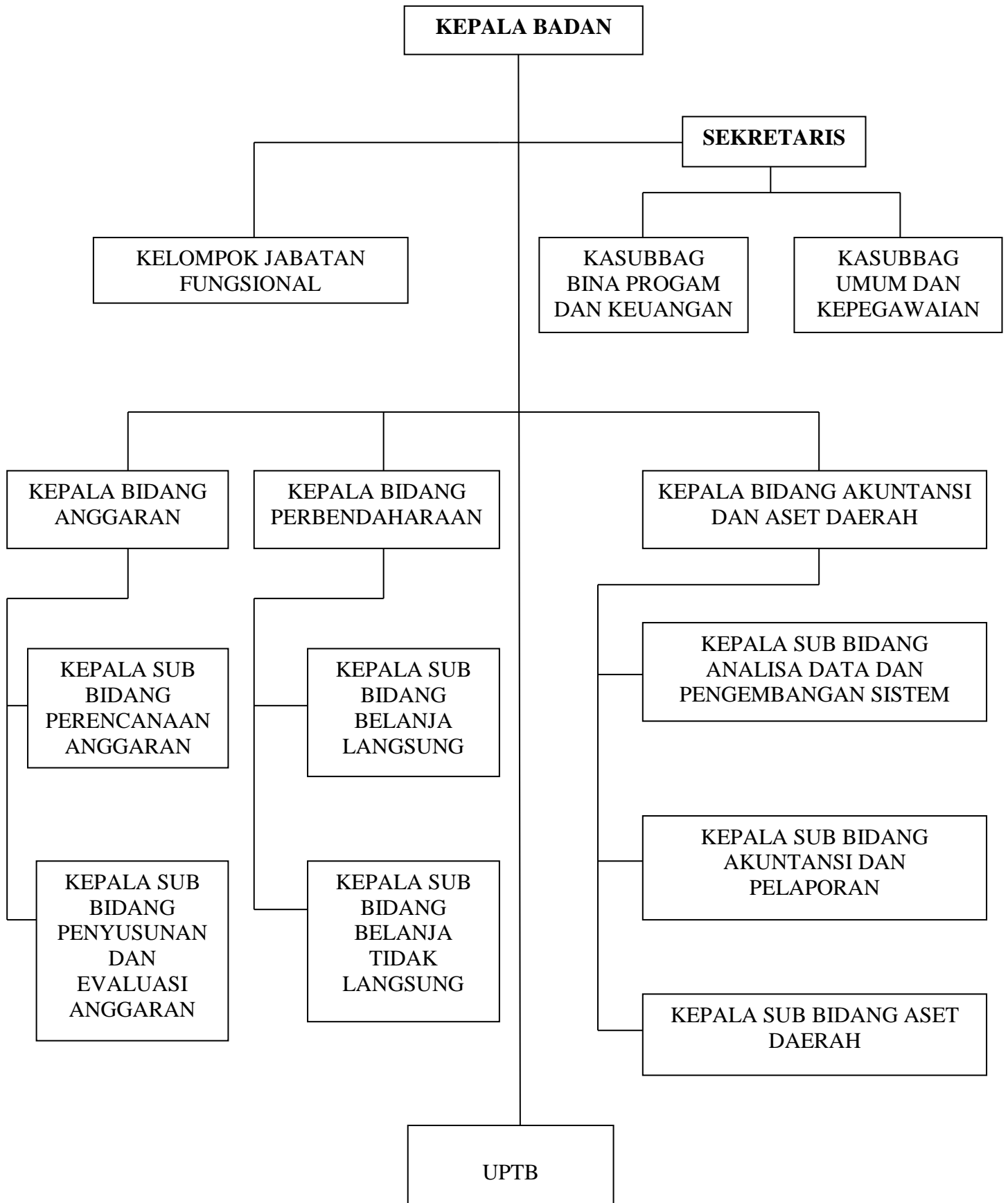
Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang di pimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam melaksanakan tupoksinya membawahi :

1. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Badan ;
  - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - c. Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan ;
2. Bidang Anggaran, terdiri dari :
  - a. Kepala Bidang ;
  - b. Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Evaluasi Anggaran ;
  - c. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran.
3. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
  - a. Kepala Bidang ;
  - b. Kepala Sub Bidang Belanja Langsung ;
  - c. Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.
4. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Bidang ;
  - b. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
  - c. Kepala Sub Bidang Analisa Data dan Pengembangan Sistem;
  - d. Kepala Sub Bidang Aset Daerah.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**



### 3. Komposisi Pegawai

Untuk mendukung kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang hingga akhir Desember 2018 memiliki pegawai sebanyak 53 orang yang terdiri dari laki-laki 23 orang, perempuan 30 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel : 1.2

Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Pemalang  
Berdasarkan Tingkat Golongan  
Tahun 2018

No	Uraian	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1.	Kepala Badan	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	-	2	11	1	14
3.	Bidang Anggaran	-	-	8	2	10
4.	Bidang Perbendaharaan	-	1	10	1	12
7.	Bidang Akuntansi dan Aset Daerah	-	1	12	3	16
	Jumlah	-	4	38	8	53

Tabel : 1.3

Distribusi Pegawai BPKAD Kabupaten Pemalang  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Tahun 2018

No	Uraian	SLTP	SLTA	Dip	S-1	S-2	Jml
1.	Kepala Badan	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	1	3	-	8	2	15
4.	Bidang Anggaran	-	3	-	3	4	9
6.	Bidang Perbendaharaan	-	4	2	4	2	12
7.	Bidang Akuntansi dan Aset Daerah	-	2	-	10	4	16
	Jumlah	1	12	2	25	13	53

#### **4. Tujuan dan Manfaat LKjIP**

##### **1. Tujuan LKjIP**

Tujuan disusunnya LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terstruktur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Selain hal tersebut LKjIP bertujuan untuk pengambilan keputusan untuk melaksanakan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan.

##### **2. Manfaat LKjIP**

Mendasari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya dalam menyelenggarakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dalam rangka meningkatkan

kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

## **5. Sistematika Penyajian**

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 melaporkan capaian kinerja BPKAD selama Tahun 2018, yang diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana Tahun 2018 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 sebagai berikut :

- Bab I   Pendahuluan
  - 1. Latar Belakang
  - 2. Struktur Organisasi
  - 3. Komposisi Pegawai
  - 4. Tujuan dan Manfaat LKjIP
  - 5. Sistematika Penyajian
  
- Bab II   Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
  - A. Rencana Strategis
    - 1. Visi dan Misi
    - 2. Tujuan BPKAD
    - 3. Sasaran BPKAD
    - 4. Strategi BPKAD
    - 5. Kebijakan
    - 6. Program dan Kegiatan
  - B. Perjanjian Kinerja 2018
  
- Bab III   Akuntabilitas Kinerja
  - A. Capaian Kinerja
  - B. Akuntabilitas Keuangan
  
- Bab IV   Penutup

## **BAB II**

### **PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

##### **1. Visi dan Misi**

Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan, terkait dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 2016-2021.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemalang Terpilih periode 2016-2021 adalah “ **Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera** “. Adapun Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemalang Terpilih adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.

5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Berdasarkan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, maka keterlibatan langsung BPKAD Kabupaten Pemalang adalah pada misi ke 6 (enam) yaitu “ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

Peran serta BPKAD dalam misi dimaksud adalah meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

Tugas BPKAD Kabupaten Pemalang terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah “ Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta melaksanakan Tugas Pembantuan.

## **2. Tujuan BPKAD**

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) adalah Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) antara lain :

- a) Memfasilitasi pencairan dana yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun yang diajukan oleh individu/kelompok/Pemerintah Desa melalui Perangkat daerah pengampu;



- b) Memfasilitasi pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) beserta tunjangannya;
- c) Mengelola aset daerah dari pencatatan, pengklasifikasian, penetapan status, penatausahaan dan inventarisasi, penjualan dan penghapusan.
- d) Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah yang disewakan untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pendapatan sewa;
- e) Melaksanakan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Laporan Keuangan.
- f) Melaksanakan pendampingan kepada perangkat daerah dalam melakukan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan perubahannya.
- g) Menyusun Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana ( SPD ) sebagai dasar pengajuan pencairan dana bagi perangkat daerah.
- h) Melaksanakan pendampingan kepada perangkat daerah dalam menyusun Laporan Barang Milik Daerah ( BMD ).

Tersusunnya Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Pematang Jaya memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

### **3. Sasaran BPKAD**

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Berdasarkan hal tersebut sasaran strategis yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya untuk Tahun

2016-2021 adalah “ **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** “.

Transparansi dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan cara memberikan informasi yang akurat tentang kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui website BPKAD, publikasi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan perubahannya serta publikasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD melalui media surat kabar.

Upaya mewujudkan akuntabilitas dilakukan dengan cara Integrasi Simda Keuangan dan Simda BMD (Barang Milik Daerah), monitoring evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah serta desk penganggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### **4. Strategi BPKAD**

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif. Strategi diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur di BPKAD untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kompetensi dengan mengikutsertakan diklat dan seminar serta penyelenggaraan sosialisasi dan bimtek pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 2) Penggunaan hardware dan software yang *compatible* dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 3) Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses data keuangan dan aset daerah yang valid serta terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berbasis Teknologi Informasi yang informatif dan tepat sasaran;
- 4) Meningkatkan kompetensi pengelola keuangan dan pengurus barang pada perangkat daerah agar tersaji data keuangan dan aset daerah yang dapat dipertanggungjawabkan;

- 5) Mewujudkan sinergitas dan relevansi data laporan keuangan dan aset daerah SKPD dengan laporan keuangan dan aset daerah konsolidasi;
- 6) Meningkatkan kinerja dan budaya kerja aparatur agar masyarakat dapat terlayani dengan baik;
- 7) Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam melaksanakan program kegiatan;
- 8) Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan aset yang optimal.

## **5. Kebijakan BPKAD**

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Adapun arah kebijakan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan strategi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas, kompetensi, profesionalisme dan produktifitas kerja aparatur pada BPKAD dengan cara pengiriman aparatur untuk mengikuti bimtek/ sosialisasi/ diklat/ workshop/ seminar tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan mencukupi kuantitas kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Penggunaan dan pengembangan Teknologi Informasi dalam upaya memberikan pelayanan yang prima atas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Memfasilitasi pelaksanaan bimtek dan pendampingan terhadap pengelola keuangan dan pengurus barang perangkat daerah;
5. Melaksanakan rekonsiliasi data keuangan dan aset daerah yang dicatat oleh perangkat daerah secara berkala guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;

6. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksanaan program dan kegiatan;
7. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan oleh atasan langsung;
8. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah serta peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.

Tabel : 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPKAD Kabupaten Pemalang

Visi : Terwujudnya Pemalang Hebat yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera.			
Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan Pelayanan Pelayanannya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur di BPKAD untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kompetensi dengan mengikutsertakan diklat dan seminar serta penyelenggaraan sosialisasi dan bimtek pengelolaan keuangan dan aset daerah;</li> <li>2. Penggunaan hardware dan software yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas, kompetensi, profesionalisme dan produktifitas kerja aparatur pada BPKAD dengan cara pengiriman aparatur untuk mengikuti bimtek/ sosialisasi/ diklat/ workshop/ seminar tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah;</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan mencukupi</li> </ol>

		<p><i>compatible</i> dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;</p> <p>3. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses data keuangan dan aset daerah yang valid serta terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berbasis Teknologi Informasi yang memadai;</p> <p>4. Meningkatkan kompetensi pengelola keuangan dan pengurus barang pada perangkat daerah agar tersaji data keuangan dan aset daerah yang dapat dipertanggungjawab</p>	<p>kuantitas kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;</p> <p>3. Penggunaan dan pengembangan Teknologi Informasi dalam upaya memberikan pelayanan yang prima atas pengelolaan keuangan dan aset daerah;</p> <p>4. Memfasilitasi pelaksanaan bimtek dan pendampingan terhadap pengelola keuangan dan pengurus barang perangkat daerah;</p>
--	--	--	---

		<p>kan;</p> <p>5. Mewujudkan sinergitas dan relevansi data laporan keuangan dan aset daerah SKPD dengan laporan keuangan dan aset daerah konsolidasi;</p> <p>6. Meningkatkan kinerja dan budaya kerja aparatur agar masyarakat dapat terlayani dengan baik;</p> <p>7. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam melaksanakan program kegiatan;</p> <p>8. Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan</p>	<p>5. Melaksanakan rekonsiliasi data keuangan dan aset daerah yang dicatat oleh perangkat daerah secara berkala guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;</p> <p>6. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksanaan program dan kegiatan;</p> <p>7. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan oleh atasan langsung;</p> <p>8. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah serta peningkatan tertib</p>
--	--	---	---

		aset yang memadai.	administrasi pengelolaan aset daerah.
--	--	--------------------	---

## 6. Program dan Kegiatan

### a) Program dan Kegiatan BPKAD

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis, melaksanakan program pelayanan yang bersifat internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan. Program yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang terdiri 1 (satu) Program yang mendukung RPJMD dan 5 (lima) Program Rutin. Program pada RPJMD 2016-2021 yang diampu oleh BPKAD yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program tersebut dijabarkan dalam 65 (enam puluh lima) kegiatan, dimana Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dan terwujudnya hasil (outcome).

Kegiatan yang mendukung program-program di BPKAD sebagai berikut :

#### A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Kegiatan yang mendukung adalah :

- 1) 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

#### Listrik

- 3) 01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
- 4) 01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 5) 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 6) 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 7) 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- 8) 01.10 Penyediaan alat tulis kantor
- 9) 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 10) 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- 11) 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 12) 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 13) 01.17 Penyediaan makanan dan minuman
  
- 14) 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah
- 15) 01.21 Penyusunan laporan realisasi penerimaan dana transfer daerah
- 16) 01.22 Penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran PPKD dan pembiayaan
- 17) 01.23 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan perbendaharaan
- 18) 01.24 Penyediaan jasa administrasi keuangan penyediaan dana dan anggaran kas
- 19) 01.27 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan Gaji

#### B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Kegiatan yang mendukung adalah :

- 1) 02.05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
- 2) 02.07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
- 3) 02.10 Pengadaan Mebeleur
- 4) 02.11 Pengadaan Komputer dan perlengkapannya
- 5) 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



- 6) 02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
  - 7) 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - 8) 02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor
  - 9) 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor
  - 10) 02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
  - 11) 02.30 Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya
  - 12) 02.45 Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim Informasi
- C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;  
Kegiatan yang mendukung adalah :
- 05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;  
Kegiatan yang mendukung adalah :
- 1) 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)
  - 2) 06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
  - 3) 06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
  - 4) 06.05 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran konsolidasi
  - 5) 06.07 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasi
  - 6) 06.08 Penyusunan rekonsiliasi data Pertanggungjawaban
- E. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;  
Kegiatan yang mendukung adalah :
- 09.02 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
- F. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;  
Kegiatan yang mendukung adalah :
- 1) 15.02 Penyusunan standar satuan harga
  - 2) 15.03 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

- 3) 15.04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
- 4) 15.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
- 5) 15.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
- 6) 15.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
- 7) 15.09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 8) 15.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- 9) 15.11 Penyusunan rancangan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- 10) 15.15 Bimbingan Teknis Implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
- 11) 15.16 Sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 12) 15.20 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS
- 13) 15.21 Pembayaran PBB aset daerah/Barang Milik Daerah
- 14) 15.22 Pendistribusian Barang Milik Daerah
- 15) 15.23 Penetapan Status Pengguna BMD, SK Pengurus Barang RKBU dan RKPBU
- 16) 15.24 Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah
- 17) 15.25 Penyelesaian pemindahtanganan dan penghapusan BMD
- 18) 15.26 Penyusunan Laporan Realisasi penerimaan BPKAD
- 19) 15.31 Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
- 20) 15.35 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
- 21) 15.54 Pengelolaan Kerugian Daerah
- 22) 15.55 Sosialisasi/Peningkatan SDM/pengurus barang/Simda BMD
- 23) 15.56 Pemantauan, pemanfaatan aset/Barang Milik

Daerah

- 24) 15.57 Penyusunan Laporan Semesteran barang milik daerah
- 25) 15.58 Pengelolaan Kas Daerah
- 26) 15.59 Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS

## **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/ pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana pada Tabel berikut ini :

**Tabel : 2.2**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Nilai	WTP
		Ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	%	100
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan ke BPK	%	100
		Ketepatan waktu penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD	%	100
		Penatausahaan Aset Daerah	%	90
		Ketepatan waktu penerbitan SP2D	%	100

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Pengukuran capaian kinerja Tahun 2018 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2018.

Analisa dilakukan terutama terhadap capaian kinerja yang kurang dari target, hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab kurangnya target capaian kinerja. Analisa tersebut akan digunakan sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja (*performance improvement*) tahun berikutnya. Kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang merupakan hasil kinerja dari bidang-bidang terkait.

Hasil evaluasi Kinerja yang diperoleh dengan cara menghitung Pengukuran Kinerja dari pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk memudahkan dalam hal pemantauan kinerja SKPD dibantu dengan tabel skala nilai sebagai berikut di bawah :

**Tabel 3.1.**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dapat dijelaskan pada tabel 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kabupaten Pemalang Tahun 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI Tahun		Tahun 2018			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2018 terhadap Target Akhir 2021	Keterangan
			2016	2017	Target	Realisasi	Capaian %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)	(11)
1.	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% = WTP 75% = WDP 50% = Disclaimer
		Ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% = TW 50% = TTW
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan ke BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% = TW 50% = TTW
		Ketepatan waktu penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% = TW 50% = TTW
		Penatausahaan Aset Daerah	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	$\frac{\text{Jml Aset tercatat di KIB}}{\text{Jml Aset tercatat pada Neraca}} \times 100\%$
		Ketepatan waktu penerbitan SP2D	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% = TW 50% = TTW

Berdasarkan hasil tabel 3.2 di atas, pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dengan Sasaran Strategis Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah memiliki indikator kinerja yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

**a) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah**

Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh BPK RI tanggal 25 Mei 2018 dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau 100% (*copy hasil opini BPK terlampir*).

**b) Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD**

Penetapan Perda APBD Tahun 2018 mencapai target yaitu tepat waktu (100%), dimana dilaksanakan pada minggu pertama bulan Oktober Tahun Sebelumnya sesuai dengan Pasal 104 ayat 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Sedangkan Perda Perubahan APBD dilaksanakan pada Minggu Kedua Bulan September Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan Pasal 172 ayat 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (*surat sebagai Bukti Penyampaian Raperda APBD 2018 dan Raperda Perubahan APBD 2018 terlampir*).

**c) Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan ke BPK**

Pemerintah Kabupaten Pemalang telah mematuhi dan melaksanakan penyampaian Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tahun 2018 sesuai ketentuan pada pasal 297 ayat 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu pada bulan Maret Tahun berikutnya (*surat sebagai Bukti Penyampaian LKD ke BPK terlampir*).

**d) Ketepatan waktu penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD**

Indikator ketepatan waktu penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2017 memenuhi target yaitu 100% (tepat waktu), hal tersebut disebabkan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menetapkan Perda APBD sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Dimana penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD pada bulan

Juni tahun berikutnya sesuai dengan pasal 298 ayat 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ( *Surat sebagai bukti penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD terlampir* )

**e) Penatausahaan Aset Daerah**

Penatausahaan aset daerah merupakan indikator kinerja yang diukur dengan membandingkan jumlah aset yang tercatat dalam KIB dibanding dengan jumlah aset yang tercatat pada Neraca dikalikan 100%. Jumlah aset tetap yang tercatat pada KIB Pemda Tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.641.946.598.653,00, sedangkan jumlah aset tetap yang tercatat pada Neraca sebesar Rp.2.694.114.626.141,30. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh realisasi indikator kinerja penatausahaan aset daerah pada tahun 2018 tercapai 98,06 %. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan dan pengakuan atas Barang Milik Daerah pada tahun 2018 telah sesuai ketentuan dengan tingkat akurasi melebihi 90%. ( *Data Aset Terlampir* )

**f) Ketepatan waktu penerbitan SP2D**

Penerbitan SP2D pada Pemerintah Kabupaten Pemalang telah sesuai dengan SOP yang ditetapkan yaitu 3 (tiga) hari dimulai pada saat berkas pengajuan pencairan dana dari perangkat daerah diterima oleh BPKAD ( *Data Dukung terlampir* )

**B. Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada tahun 2018, didukung dengan anggaran yang teralokasi sejumlah Rp. 21.010.207.900,00,- dan terserap sejumlah Rp. 19.428.770.695,00,- atau terrealisasi 92,47 %. Perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi keuangan disajikan dalam tabel berikut:



Tabel : 3.3

## PROGRAM DAN KEGIATAN YANG Mendukung Indikator Kinerja Perangkat Daerah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (TAHUN)	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				LOKASI	KET
					TW I	TW II	TW III	TW IV							TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2		3	5	6				7	8	9	11	12	13	14				15	16
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	1 Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	%			100 %	100 %	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01)	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	12 Bulan	3,757,627,000								
			2 Ketepatan Waktu Penerbitan SP2D	%	100 %	100 %	100 %	100 %	01. Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8000 Surat/No tdn	30,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD	
			3 Penatausahaan Aset Daerah	%	90 %	90 %	90 %	90 %	01. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Komunikasi, Air/ Listrik dan Internet	4 Jenis	628,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD	
				%	90 %	90 %	90 %	90 %	01. Penyediaan Jasa Jaminan BMD	Terasuransikannya Kendaraan Dinas Roda Empat dan Alat Berat dalam satu tahun	185 Unit	830,000,000	Subbid Aset Daerah	Purbo Raras Raharjanti, SE, MSi			√	√	BPKAD	

4	Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	%		100%															
5	Ketepatan Waktu Penyampaian LKD ke BPK	%	100%																
01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				53 Unit	15,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√					BPKAD		
01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				12 SK	270,000,000	Subbag Bina Program dan Keuangan	Evie Kusumaning Rahmawati, SE	√	√	√	√					BPKAD		
					12 Laporan				√	√	√	√					BPKAD		
					12 Kali				√	√	√	√					BPKAD		
01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				4 Orang	85,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√					BPKAD		
01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				10 Unit	15,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√					BPKAD		
01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				30 Jenis	90,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√					BPKAD		

01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak	11 Jenis	50,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	12 kali	15,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD
01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	22,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD
01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan ( Surat kabar, majalah dan buku perundang-undangan )	11 Jenis	25,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD
01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan minuman Pegawai selama setahun	4 Jenis	135,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD
01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar maupun ke dalam daerah	2 Jenis	450,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD
01.21	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dana Transfer Daerah	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan Dana Transfer dari Pusat	12 Laporan	190,000,000	Subbag Bina Program dan Keuangan	Evie Kusumaning Rahmawati, SE	√	√	√	√	BPKAD
		Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil dari Propinsi dan Laporan Bantuan Keuangan dari Propinsi	8 Laporan				√	√	√	√	BPKAD

01.22	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan PPKD dan Penerimaan Pembiayaan.	24 Laporan	350,000,000	Subbag Bina Program dan Keuangan	Evie Kusumaning Rahmawati, SE	√	√	√	√	BPKAD
		Tersusunnya Laporan Realisasi Pengeluaran PPKD dan Pengeluaran Pembiayaan	24 Laporan				√	√	√	√	BPKAD
		Tersusunnya Laporan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.	2 Laporan					√	√		BPKAD
		Terlaksananya Verifikasi Berkas Pencairan Dana Belanja Tidak Langsung PPKD dan Pembiayaan.	2.750 Berkas				√	√	√	√	BPKAD
01.23	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Perbendaharaan	Terlaksananya Penerbitan SP2D Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung selama satu Tahun	11.000 SP2D	349,627,000	Subbid Belanja Langsung	Ambar Wibowati, BSc	√	√	√	√	BPKAD
01.24	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Dana dan Anggaran Kas	Tersusunnya Surat Penyediaan Dana dan Anggaran Kas Perangkat Daerah	175 SPD	123,000,000	Subbid Perencanaan Anggaran	Agung Eko Widodo, SE.Ak, MM	√	√	√	√	BPKAD
		Tersusunnya Anggaran Kas Perangkat Daerah	100 Dokumen				√		√		BPKAD
01.27	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Gaji	Tersusunnya Dokumen Penghentian Pembayaran Gaji PNS ( SKPP )	500 SKPP	85,000,000	Subbid Belanja Tidak Langsung	Muzaena h, SE, MM	√	√	√	√	BPKAD

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (02)	Terpenuhiya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	12 bulan	1,430,623,000														
02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor selama setahun	3 Unit AC	25,500,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√											BPKAD
02.10	Pengadaan Meubeleur	Terlaksananya Pengadaan Meubeleur selama setahun	17 Unit	42,050,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP		√										BPKAD
02.11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya selama satu tahun	9 Unit	241,500,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√									BPKAD
02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 Lokal	500,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√								BPKAD
02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1 Unit	50,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√								BPKAD
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenadaraan Dinas Operasional	52 Unit	155,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√								BPKAD
02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	33 Unit	30,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√								BPKAD

						02. 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 Unit Genset	15,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD		
						02. 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur selama setahun	1 Paket	10,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD		
						02. 30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Perlengkapannya	75 Unit	20,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD		
						02. 45	Pemeliharaan Rutin/Berkala Software dan Sistim Informasi	Terlaksananya Pemeliharaan Sistim Informasi Keuangan dan Sistim Informasi Pengelolaan BMD	2 Software	341,573,000	Subbid Analisa Data dan pengembangan Sistem	Teguh Mushoffa, SE, MSi	√	√	√	√	BPKAD		
					3.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (05)	Persentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi	80%	450,000,000									
						05. 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksana dan terkirimnya peserta Sosialisasi/Diklat/Seminar/Work shop/Bimtek selama satu tahun	1 kali, 85 Orang	450,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√					BPKAD	
					4.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (06)	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersedia	80%	874,130,500									

06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LKJIP BPKAD	1 Dokumen	64,000,000	Subbag Bina Program dan Keuangan	Evie Kusumaning Rahmawati, SE	√				BPKAD	
		Tersusunnya Perjanjian Kinerja dan RKT	15 Dokumen				√				BPKAD	
		Tersusunnya SAKIP BPKAD	1 dokumen					√			BPKAD	
06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis BPKAD	2 Dokumen	20,000,000	Subbag Bina Program dan Keuangan	Evie Kusumaning Rahmawati, SE		√			BPKAD	
6.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun BPKAD	1 Laporan	54,000,000	Subbag Bina Program dan Keuangan	Evie Kusumaning Rahmawati, SE		√			BPKAD	
		Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) BPKAD TA 2018	1 Dokumen					√			BPKAD	
		Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah ( LPPD )	1 Dokumen					√			BPKAD	
6.05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Konsolidasi	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis ( Konsolidasi )	2 Dokumen	103,812,500	Subbid Akuntansi dan Pelaporan	Darmawan, SE			√		BPKAD	

6.0 7	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Konsolidasi	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2018 ( Konsolidasi )	1 LKD	316,681,250	Subbid Akuntansi dan Pelaporan	Darmawan, SE	√				BPKAD	
		Tersusunnya Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2018	1 Dokumen				√				BPKAD	
		Tersusunnya buku Himpunan LHP BPK RI atas LKD 2018	1 Dokumen				√				BPKAD	
6.0 8	Penyusunan Rekonsiliasi Data Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Laporan Realisasi Pendapatan SKPD dan SKPKD ( Hasil Rekonsiliasi Bulanan )	24 Laporan	162,730,700	Subbid analisa data dan Pengembangan Sistem	Teguh Mushoffa, SE, MSi	√	√	√	√	BPKAD	
		Tersusunnya Laporan Realisasi Belanja Bulanan SKPD dan SKPKD ( hasil rekonsiliasi bulanan )	24 Laporan				√	√	√	√	BPKAD	
6.0 9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ( RTP ) Berbasis Resiko	1 dokumen	152,906,050	Subbag Bina Program dan Keuangan	Evie Kusumaning Rahmawati, SE	√				BPKAD	
		Tersusunnya Laporan Evaluasi Realisasi RKPD Triwulanan.	4 Laporan				√	√	√	√	BPKAD	
		Tersusunnya Satuan Tugas Maturitas SPIP, Counterpart dan Dokumen Pendukung Maturitas SPIP Self Assesment ( SA )	1 dokumen				√				BPKAD	



		Terlaksananya Rekomendasi BPK RI atas Tindak Lanjut LHP.	1 Buku							√	BPKAD	
		Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik Kegiatan tiap bulan (emonev)	12 Laporan					√	√	√	√	BPKAD
5	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD (09)	Jenis Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang tersedia	80%	150,000,000								
9.0	2 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya RKA/RKAP/DPA/DPPA BPKAD dan PPKD.	10 Dokumen	150,000,000	Subbag Bina Program dan Keuangan	Evie Kusumaning Rahmawati, SE	√	√	√	√	BPKAD	
		Tersusunnya Renstra dan Renja BPKAD	3 Dokumen				√		√	BPKAD		
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (15)	Ketepatan Waktu Penyampaian RKA SKPD	100%	8,798,831,500								
		Ketepatan Waktu Penyusunan SPD	100%									
		Ketepatan Waktu Pencairan Dana	100%									
		Persentase Pemanfaatan Aset	90%									
		Persentase Pengamanan Aset	65%									

		Persentase Pemindahtanganan Aset	90%										
		Penyusunan Laporan BMD tepat Waktu	100%										
		Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Realisasi Semester I	100%										
		Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	100%										
	15.02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersusunnya Perbup tentang Standarisasi Satuan Harga dan Perubahannya	2 dokumen	182,000,000	Subbid Perencanaan Anggaran	Agung Eko Widodo, SE.Ak, MM	√		√		BPKAD	
	15.03	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah.	1 Perbup	112,562,000	Subbid Akuntansi dan Pelaporan	Darmawan, SE		√			BPKAD	
			Tersusunnya buku saku ringkasan kebijakan akuntansi Pemkab Pematang	1 Buku					√			BPKAD	
	15.04	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan APBD	1 perbup	141,320,000	Subbid Belanja Langsung	Ambar Wibowati, BSc	√				BPKAD	
	15.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusunnya Perda tentang APBD	1 perda	370,000,000	Subbid Penyusunan dan Evaluasi Anggaran	Suhartono, SIP				√	BPKAD	
	15.07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Perbup tentang Penjabaran APBD	1 perbup	100,000,000	Subbid Penyusunan dan Evaluasi Anggaran	Suhartono, SIP				√	BPKAD	

15.08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD	1 perda	430,000,000	Subbid Penyusunan dan Evaluasi Anggaran	Suhartono, SIP		√			BPKAD
15.09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 perbup	96,000,000	Subbid Penyusunan dan Evaluasi Anggaran	Suhartono, SIP		√			BPKAD
15.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perda	375,512,500	Subbid Akuntansi dan Pelaporan	Darmawan, SE		√			BPKAD
15.11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perbup	63,250,000	Subbid Akuntansi dan Pelaporan	Darmawan, SE		√			BPKAD
15.15	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	1 kali	132,000,000	Subbid Akuntansi dan Pelaporan	Darmawan, SE		√			BPKAD
15.16	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pemalang	Terfasilitasinya pembuatan sertifikat tanah milik Pemkab Pemalang	44 Sertifikat	250,000,000	Subbid Aset Daerah	Purbo Raras Raharjanti, SE, MSi	√		√		BPKAD

		Terpasangnya papan identitas tanah di atas tanah milik Pemkab Pemalang dan dalam kondisi baik.	96 papan identitas				√		√			BPKAD
15.20	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS	Tersusunnya Dokumen Pendukung Pembayaran Gaji PNS seKabupaten Pemalang	12.400 Dokumen	435,515,000	Subbid Belanja Tidak Langsung	Muzaena h, SE, MM	√	√	√	√		BPKAD
15.21	Pembayaran PBB Aset Daerah/BMD	Terlaksananya Pembayaran PBB atas Tanah Milik Pemkab Pemalang	78 Bidang	40,000,000	Subbid Aset Daerah	Purbo Raras Raharjanti, SE, MSi	√					BPKAD
15.22	Pendistribusian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pendistribusian BMD selama satu tahun	4 kali	20,000,000	Subbid Aset Daerah	Purbo Raras Raharjanti, SE, MSi	√	√	√	√		BPKAD
15.23	Penetapan Status Pengguna BMD, SK Pengurus Barang RKB dan RKPBU	Tersusunnya Keputusan Bupati tentang penetapan status pengguna BMD	1 SK	115,500,000	Subbid Aset Daerah	Purbo Raras Raharjanti, SE, MSi	√					BPKAD
		Tersusunnya Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pengurus Barang SKPD dan Perubahannya.	1 SK				√					BPKAD
		Tersusunnya RKBMD dan RKPMD	2 Dokumen				√			√		BPKAD
15.24	Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Semesteran BMD BPKAD	2 Laporan	35,000,000	Subbag Bina Program dan Keuangan	Evie Kusumaning Rahmawati, SE		√		√		BPKAD

15.25	Penyelesaian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	Terlaksananya Proses Penghapusan BMD selama satu tahun	2 Laporan	150,000,000	Subbid Aset Daerah	Purbo Raras Raharjanti, SE, MSi	√		√			BPKAD
15.26	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan BPKAD	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan BPKAD selama satu tahun	12 Laporan	75,000,000	Subbag Bina Program dan Keuangan	Evie Kusumaning Rahmawati, SE	√	√	√	√		BPKAD
15.31	Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Tersusunnya Perbup tentang Sistem Informasi Akuntansi Pemda.	1 Perbup	135,300,000	Subbag analisa Data dan pengembangan Sistem	Teguh Mushoffa, SE, MSi	√					BPKAD
15.35	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan fasilitasi tata kelola keuangan daerah kepada perangkat daerah dan tersusunnya laporan hasil sosialisasi dan fasilitasi selama satu tahun.	100 Laporan	120,000,000	Subbid Perencanaan Anggaran	Agung Eko Widodo, SE.Ak, MM	√	√	√	√		BPKAD
15.54	Pengelolaan Kerugian Daerah	Terlaksananya penggantian kerugian daerah yang harus diselesaikan selama satu tahun	4 Laporan	87,872,000	Subbid Belanja Langsung	Ambar Wibowati, BSc		√	√	√		BPKAD
15.55	Sosialisasi/Peningkatan SDM/Pengurus Barang/Simda BMD	Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan BMD terhadap pengurus barang perangkat daerah	3 kali	200,000,000	Subbid Aset Daerah	Purbo Raras Raharjanti, SE, MSi	√	√	√			BPKAD
15.56	Pemantauan, Pemanfaatan Aset/BMD	Terlaksananya kegiatan pemanfaatan dan pemantauan BMD, Tersusunnya Laporan hasil pemantauan pemanfaatan BMD selama satu tahun	12 laporan	120,000,000	Subbid Aset Daerah	Purbo Raras Raharjanti, SE, MSi	√	√	√	√		BPKAD
15.57	Penyusunan Laporan Semesteran BMD (Konsolidasi)	Tersusunnya Laporan Semesteran BMD (Konsolidasi)	1 laporan	300,000,000	Subbid Aset Daerah	Purbo Raras Raharjanti, SE, MSi		√				BPKAD

								15.	Pengelolaan Kas Daerah	Tersusunnya Laporan Mutasi Deposito.	12 Laporan	115,000,000	Subbid Belanja Tidak Langsung	Muzaena h, SE, MM	√	√	√	√	BPKAD		
										Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah	12 laporan				√	√	√	√	BPKAD		
								15.	Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS	Tersusunnya Laporan Bahan Penyusunan KUA PPAS selama satu tahun	2 Laporan	141,000,000	Subbid Perencanaan Anggaran	Agung Eko Widodo, SE.Ak, MM	√		√		BPKAD		
								15.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD oleh SKPKD	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Operasional SKPD oleh SKPKD	18 Unit	4,456,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP		√			BPKAD		

Tabel : 3.4  
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018

REALISASI KINERJA			
No.	Program / Kegiatan	Target	Realisasi
1.	<p style="text-align: center;">Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Standar Satuan Harga</li> <li>2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD</li> <li>3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD</li> <li>4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD</li> <li>5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD</li> <li>6. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah</li> </ol> <p style="text-align: center;">Program : Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD</li> </ol>	<p style="text-align: center;">300 buku</p> <p style="text-align: center;">2 paket</p> <p style="text-align: center;">2 paket</p> <p style="text-align: center;">2 paket</p> <p style="text-align: center;">2 paket</p> <p style="text-align: center;">2 paket</p> <p style="text-align: center;">200 buku</p> <p style="text-align: center;">5 Dokumen, 105 buku</p>	<p style="text-align: center;">300 buku</p> <p style="text-align: center;">2 paket</p> <p style="text-align: center;">2 paket</p> <p style="text-align: center;">2 paket</p> <p style="text-align: center;">2 paket</p> <p style="text-align: center;">200 buku</p> <p style="text-align: center;">5 dokumen, 105 buku</p>
2.	<p style="text-align: center;">Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah</li> <li>2. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>3. Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah</li> <li>4. Peningkatan kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah</li> </ol> <p style="text-align: center;">Program : Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran</li> <li>2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Konsolidasi</li> <li>3. Penyusunan Rekonsiliasi Data Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</li> <li>4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasi</li> </ol> <p style="text-align: center;">Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik</li> <li>3. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</li> <li>4. Penyediaan Jasa administrasi keuangan</li> <li>5. Penyediaan jasa kebersihan kantor</li> <li>6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</li> <li>7. Penyediaan alat tulis kantor</li> </ol>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">120 orang</p> <p style="text-align: center;">1 dokumen</p> <p style="text-align: center;">100 laporan</p> <p style="text-align: center;">20 buku</p> <p style="text-align: center;">100 buku, 3 dokumen</p> <p style="text-align: center;">24 laporan</p> <p style="text-align: center;">138 buku</p> <p style="text-align: center;">7.700 surat/notdin</p> <p style="text-align: center;">4 jenis</p> <p style="text-align: center;">32 unit</p> <p style="text-align: center;">14 SK, 24 laporan</p> <p style="text-align: center;">12 bulan</p> <p style="text-align: center;">10 unit</p> <p style="text-align: center;">1 paket, 30 toner</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">120 orang</p> <p style="text-align: center;">1 dokumen</p> <p style="text-align: center;">100 laporan</p> <p style="text-align: center;">20 buku</p> <p style="text-align: center;">100 buku, 3 dokumen</p> <p style="text-align: center;">24 laporan</p> <p style="text-align: center;">138 buku</p> <p style="text-align: center;">7.700 surat/notdin</p> <p style="text-align: center;">4 jenis</p> <p style="text-align: center;">32 unit</p> <p style="text-align: center;">17 SK, 24 laporan</p> <p style="text-align: center;">12 bulan</p> <p style="text-align: center;">10 unit</p> <p style="text-align: center;">1 paket, 30 toner</p>

8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3 paket, 15 buah	3 paket, 15 buah
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 unit, 80 buah	5 unit, 80 buah
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan, 1 paket	12 bulan, 1 paket
12. Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan, 4 jenis	12 bulan, 4 jenis
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah	12 bulan	12 bulan
14. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dana Transfer Daerah	24 laporan	24 laporan
15. Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan	100 laporan	100 laporan
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	43 unit mobil, 9 unit motor	43 unit mobil, 9 unit motor
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3 unit AC	3 unit AC
3. Pengadaan Meubeleur	23 unit	20 unit
4. Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	25 unit	25 unit
5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	12 bulan, 2 unit gedung	12 bulan, 2 unit gedung
6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	1 unit, 12 bulan	1 unit, 12 bulan
7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	32 unit	32 unit
8. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10 jenis, 12 bulan	10 jenis, 12 bulan
9. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 unit genset	1 unit genset
10. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	1 set, 12 bulan	1 set, 12 bulan
11. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	50 unit	50 unit
12. Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistem informasi	1 sistem, 1 jaringan	1 sistem, 1 jaringan
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	10 orang	4 orang
Program : Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (TAPKIN)	15 buku, 16 dokumen	15 buku, 16 dokumen
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	20 buku	20 buku



3.	<p>Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</li> <li>2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</li> <li>3. Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS</li> <li>4. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan BPKAD</li> <li>5. Pengelolaan Kerugian Daerah</li> </ol> <p>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Dana dan Anggaran Kas</li> </ol>	<p>815 buku</p> <p>139 buku</p> <p>2 laporan</p> <p>12 laporan</p> <p>4 laporan</p> <p>300 SPD</p>	<p>815 buku</p> <p>139 buku</p> <p>2 laporan</p> <p>12 laporan</p> <p>4 laporan</p> <p>300 SPD</p>
4.	<p>Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pemalang</li> <li>2. Pembayaran PBB Aset Daerah / Barang Milik Daerah</li> <li>3. Pendistribusian Barang Milik Daerah</li> <li>4. Penetapan status pengguna BMD, SK Pengurus Barang RKB dan RKPBU</li> <li>5. Penyusunan Laporan Semesteran BMD (konsolidasi)</li> <li>6. Pemantauan Pemanfaatan Aset/BMD</li> <li>7. Penyelesaian pemindahtanganan dan penghapusan BMD</li> <li>8. Sosialisasi/peningkatan SDM/pengurus barang/Simda BMD</li> <li>9. Penyusunan Laporan Semesteran BMD</li> </ol> <p>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah</li> </ol>	<p>46 sertifikat, 96 papan identitas aset 150 SPT</p> <p>3 kali</p> <p>300 buku</p> <p>1 laporan</p> <p>12 laporan</p> <p>2 laporan</p> <p>100 orang, 3 kali</p> <p>2 laporan</p> <p>155 unit</p>	<p>39 sertifikat, 96 papan identitas aset 67 SPT</p> <p>2 kali</p> <p>300 buku</p> <p>1 laporan</p> <p>12 laporan</p> <p>2 laporan</p> <p>100 orang, 3 kali</p> <p>2 laporan</p> <p>154 unit</p>
5.	<p>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Perbendaharaan</li> <li>2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Gaji</li> </ol> <p>Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS</li> <li>2. Pengelolaan Kas Daerah</li> </ol>	<p>10.000 SP2D</p> <p>500 SKP</p> <p>12.400 dokumen</p> <p>24 laporan</p>	<p>10.000 SP2D</p> <p>500 SKP</p> <p>12.400 dokumen</p> <p>24 laporan</p>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang disusun sebagai sarana evaluasi dan motivasi administrasi yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tahun berikutnya, sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada tahun anggaran berikutnya. Dari 6 Program dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang telah mencapai target dan seluruh kegiatan telah dilaksanakan efektif, efisien dan telah mencapai sasaran.
2. Dalam upaya mewujudkan target kinerja dan pencapaian sasaran yang belum dicapai, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang akan melakukan langkah-langkah yang konkrit antara lain :
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kendala-kendala dan hambatan pada setiap pelaksanaan kegiatan;
  - Penyusunan Rencana Kerja BPKAD yang lebih matang dan komprehensif untuk tahun-tahun berikutnya selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD 2016 - 2021 dengan melibatkan seluruh komponen;
  - Melaksanakan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang melalui kegiatan pelatihan-pelatihan atau Bimbingan Teknis Aparatur;
  - Melaksanakan koordinasi secara intensif antar bidang-bidang dan sekretariat BPKAD dalam pelaksanaan kegiatan agar tercapai kegiatan yang komprehensif dalam mendukung fungsi BPKAD.

## Lampiran :

### Ketidaktercapaian Output Realisasi Kinerja

#### 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

##### - Kegiatan Pengadaan Meubeleur

Target Capaian Kinerja atas Kegiatan Pengadaan Meubeleur yaitu 23 unit, sedangkan realisasi output hanya 20 unit. Hal tersebut disebabkan karena pertimbangan efisiensi anggaran terkait rencana penataan ruang kerja BPKAD secara bertahap sehingga target output berupa pengadaan lemari arsip sebanyak 3 unit tidak dilaksanakan.

##### - Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Target Output Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yaitu pengiriman peserta Bimtek/Diklat/Sosialisasi/Seminar sebanyak 10 orang, sedangkan realisasinya yang diberangkatkan hanya 4 orang. Hal ini terkait dengan pertimbangan efisiensi anggaran, relevansi materi Bimtek/Diklat/Sosialisasi/Seminar dan kompetensi SDM yang dibutuhkan BPKAD.

#### 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

##### - Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pemalang

Target output atas Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu 46 sertifikat dan 96 papan identitas tanah milik Pemda, realisasi output kegiatan tersebut sebanyak 39 sertifikat dan 96 papan identitas. Tidak tercapainya target pensertifikatan tanah milik Pemkab Pemalang disebabkan belum terpenuhinya persyaratan pensertifikatan tanah secara lengkap sebagaimana yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

- **Kegiatan Pembayaran PBB Aset Daerah/Barang Milik Daerah**

Target output Kegiatan Pembayaran PBB Aset Daerah/ Barang Milik Daerah adalah 150 SPT, sedangkan realisasi atas kegiatan tersebut hanya 67 SPT. Hal ini disebabkan karena jumlah SPT yang diajukan oleh Kelurahan ke BPKAD hanya 67 SPT.

- **Kegiatan Pendistribusian Barang Milik Daerah**

Target Output Kegiatan Pendistribusian Barang Milik Daerah adalah 3 kali, sedangkan realisasi output kegiatan tersebut adalah 2 kali. Ketidaktercapaian output kinerja kegiatan tersebut dikarenakan jumlah pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional SKPD dilaksanakan 2 tahap sehingga pelaksanaan pendistribusian BMD pun dilaksanakan hanya 2 kali. Pada Tahun 2018, tidak dilaksanakan pendistribusian BMD yang merupakan mutasi antar SKPD karena tidak ada usulan/permintaan dari SKPD.











